

Menguliti Jati Diri Pers Indonesia

oleh Ariel Heryanto

Ketika pertama kali mendengar tentang buku *Tajuk-tajuk Dalam Terik Matahari* (TDTM) —yang diterbitkan untuk memperingati 40 tahun Harian *Surabaya Post*— saya berprasangka isinya akan lebih banyak berupa basa-basi sebagaimana layaknya karya jurnalisisme Pancasila, atau sekadar sambutan untuk sebuah peringatan ulang tahun. Ternyata prasangka ini sangat memalukan. TDTM jauh lebih menarik dan berbobot daripada banyak ulasan tentang pers Indonesia yang pernah saya temui.

Buku TDTM menyajikan berbagai persoalan penting. Tidak mudah memilih salah satu dari yang banyak itu untuk dibahas di sini. Karena disusun oleh banyak penulis secara individual, TDTM tidak dapat dibicarakan sebagai suatu pandangan utuh dari seorang penutur bersuara tunggal.

Tanpa melupakan kemajemukan itu, saya menangkap adanya suatu arus pandangan yang dominan di antara banyak penulis TDTM tentang identitas dan peran normatif pers di tengah masyarakatnya. Pandangan inilah yang ingin saya bahas secara kritis.

Humanisme Romantik

Dalam pandangan dominan di buku TDTM, pers (Indonesia) dibicarakan seakan-akan sebagai sebuah institusi yang secara esensial otonomi, bersih, lugu, jujur, mulia, dan pejuang keadilan bagi semua. Tapi secara eksistensial ia dikepung, digoda, dan diserbu oleh berbagai ancaman, kuman, dan kekuatan eksternal yang negatif. Pers dipahami sebagai subjek yang baik, tapi tak berdaya menghadapi tekanan struktur yang ke-

jam. Bagai anak perawan di sarang penyamun.

Pandangan itu dapat disebut sebagai sisa-sisa humanisme-romantik yang bersumber dari Eropa, dan pernah dominan di tanah leluhurnya pada masa jayanya kolonialisme sebelum abad 20. Pandangan ini masih dominan di Indonesia pada masa sekarang di berbagai bidang, dari politik hingga kesenian.

Pandangan humanis-romantik menekankan dikotomi subjek/struktur dan mengunggulkan nilai yang disebut pertama. Dikotomi subjek/struktur itu dengan mudah diterjemahkan menjadi berbagai dikotomi lain, misalnya pers/masyarakat, swasta/negara, idealisme/industrialisme, dan sebagainya.

Karena romantisme sangat memuja alam, tidak menghekan jika hubungan pers dan lingkungan sosialnya digambarkan oleh editor buku TDTM ini sebagai "tajuk versus terik matahari". Yang satu indah tapi di bawah dan lemah. Yang lain penting sebagai sumber energi, tapi ganas (hlm. 31). Keduanya berada pada satu ekosistem yang sama, tapi esensinya berbeda.

Wawasan humanis-romantik demikian tampil lebih ekstrem pada pembahasan tentang sejarah pers sebelum 1970-an. Kajian tentang identitas pers direduksi menjadi kajian identitas subjektif pendiri/pimpinan penerbitan. Kajian tentang watak *Surabaya Post*, misalnya, direduksi menjadi kajian biografi Abdul Azis dan Toety Amisutin Agusdina.

Kritik dan alternatif terhadap wawasan itu diajukan Daniel Dhakidae (hlm. 363-380). Ia mengunggulkan perspektif strukturalisme ekonomi-politik yang, sebaliknya, samasekali tak memberi tempat kepada

subjek.

Wawasan

pasca-strukturalisme tak dipertimbangkan dalam buku setebal lebih dari 500 halaman ini. Dalam wawasan ini bisa dikaji pers mungkin sebenarnya tak punya esensi apa pun yang otonom. Ia secara luar/dalam (esensi/eksistensi) merupakan hasil bentuk strukturnya.

Dan sebaliknya, struktur dibentuk oleh si subjek secara luar/dalam. Dikotomi subjek/struktur diruntuhkan. Yang terjadi bukan sekadar interdependensi atau inter-aksi, tapi inter-penetrasi bahkan inter-konstitusi.

Buah dari wawasan humanis-romantik yang mendominasi TDTM ialah setumpuk harapan, tuntutan, ratapan, dan penghakiman terhadap identitas dan perilaku pers Indonesia yang paradoks.

Di satu pihak, watak pers (misalnya moderat atau radikal) dianggap sebagai pilihan yang bebas dan subjektif bagi pengelola penerbitan. Entah pilihan ini berkait dengan selera dan kepribadian pengelola, atau karena kecerdasan pekerjaannya yang dapat dibina oleh lembaga, seperti LP3Y.

Implikasinya bisa kurang enak. Kalau ada pers yang jujur atau bersikap kritis dan kemudian dibredel, hal itu bisa dianggap akibat ketololan atau kebandelan pengelolanya sendiri. Bukan salah struktur atau kepentingan penguasa negara. Menurut Jakob Oetama: "kemandirian pers... adalah pilihan... kemauan politik pers itu sendiri" (hlm. 484).

Di pihak lain, pers dianggap "sejatinya" (hlm. 398) tidak bisa oportunis, korup, atau brengsek. Diasumsikan kodrat, jati diri, esensi "alamiah" pers ialah

"memelihara akal sehat" atau "membangun jiwa bebas", menurut Ashadi Siregar (hlm. 392-3, 383).

Maka, kalau ada yang tak beres dengan pers mutakhir, hal ini dianggap berada di luar tanggung jawab "pers itu sendiri". Cacat ini dianggap sepenuhnya atau terutama bersifat eksternal: SIUPP, ketergantungan pada iklan dan kompetisi pasar. Bila ini terjadi, seorang Adnan Buyung Nasution berseru "saya menggugat seluruh jajaran pers agar memahami kembali jati dirinya" (hlm. 519).

Tapi, gugatan seperti yang diajukan Abang Nasution itu tak akan pernah terpenuhi. Bukan karena pers tak mau peduli, tapi karena pers memang tak pernah punya jati diri yang diasumsikan dalam gugatan yang sangat lazim itu, dan tidak hanya ditiertakkan Abang Nasution.

Dinamika Hegemoni

Dalam sejarahnya, pers pernah merupakan aktivisme progresif kaum muda, selain/di samping sebagai karier profesional jurnalisisme. Biografi *Surabaya Post* dan pendirinya memberikan salah satu contoh yang baik. Tapi perlu diperdebatkan apakah aktivisme progresif itu mewakili seluruh dinamika pers di Hindia Belanda dan/atau Indonesia? Atau minoritas?

Lebih serius lagi, apakah aktivisme itu merupakan jati diri, esensi, atau hakikat pers (seperti telanjur sering diasumsikan dan diromantisasi banyak pihak, termasuk dalam TDTM)? Ataukah itu sekadar wujud his-

toris suatu kondisi sosial yang bersifat sementara?

Akibat wawasan humanisme-romantik, buku TDTM dibanjiri istilah-istilah seperti: semangat, kesadaran, idealisme, komitmen, perjuangan, tekad, sikap, kemauan, harapan, cita-cita, misi, akal, kepercayaan. Seakan-akan semua ini menjadi sumber kekuatan terbentuknya pers masa lampau yang ideal, yang kini telah punah, dan menjadi idaman ke masa depan.

Sejauh pengamatan saya, hal-hal yang diidealkan itu masih ada di kalangan muda Indonesia hari ini. Sosok "Abdul Aziz muda" atau "Toety Amisutin Agusdina muda" masih berkembang biak di Indonesia hari ini. Bukanlah monopoli masa kolonial.

Persoalannya, jika pengamatan saya itu benar, adakah bandingan untuk *Surabaya Post* muda di zaman ini? Kalau ada, mana? Kalau tidak, mengapa? Dibutuhkan diskusi terpisah untuk menjawab secara agak pasti dan empirik pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini hanya diberikan catatan penting untuk memahami pertanyaan itu.

Pertama, pada zamannya *Surabaya Post* muda tidaklah sekuat seperti sekarang (hlm. 53-100, 238-239). Jadi, untuk mencari bandingannya masa ini, kita perlu cukup jeli mengamati aktivis muda dan karya mereka yang hari ini kelihatan remeh atau compang-camping.

Kedua, bandingan mutakhir untuk *Surabaya Post* muda tidak harus berwujud penerbitan pers aktivis muda. Setiap zaman dan kuasa punya bidang yang diprioritaskan dalam menjalankan kekuasaan.

Ada zaman di mana sastra dan pers merupakan front per-

lawanan aktivisme kaum muda terdidik. Tapi tidak harus terusan begitu. Karena itu bukan kodrat sastra ataupun pers. Di masa lain bisa agama. Atau perdagangan. Atau media massa elektronik.

Ada zaman di mana partai-politik dan parlemen menjadi pusatnya medan perjuangan keadilan. Di bidang itu pula aparat represif difokuskan penguasa. Bila represinya berhasil, organisasi non-pemerintah (ornop) bisa merupakan format alternatif bagi aktivisme kaum muda. Represi negara pun beralih dari partai dan parlemen ke bidang ini.

Pada masa lain, gerakan mahasiswa yang berbasis di kampus (dewan mahasiswa) merupakan sarang perjuangan. Kesitulah aparat keamanan negara mengerahkan sumber daya represifnya.

Kini gerakan mahasiswa berbasis di luar kampus, sementara pemogokan buruh dan protes petani mulai menggejala di mana-mana.

Kapitalisme/Industrialisasi pers bukanlah alasan bagi kita untuk menjadi pesimis. Perjuangan demokrasi tidak dimonopoli pers. Benih demokrasi tak sepenuhnya mustahil (tak juga terjamin) bisa bertumbuh dalam industrialisasi/kapitalisme.

Paul Tickell mengajukan pandangan yang mengundang kajian lebih jauh, tidak ada korelasi antara pers yang bebas dengan pers yang demokratis. Ia bahkan berpendapat, dibandingkan dengan 1950-an, pers Indonesia 1990-an lebih demokratis walau kurang bebas. (*Free from What? Responsible to Whom? The Problem of Democracy and the Indonesian Press*, makalah untuk konferensi "Indonesia Democracy 1950s and

1990s," 17-21 Desember 1992, Clayton: CSEAS, Monash University).

Konsekuensi

Pers Indonesia pernah berjasa besar dalam perjuangan nasionalisme, demokrasi, dan hak-hak asasi. Tapi pers Indonesia tidak perlu dan tidak harus terusan menjadi pemeran utama perjuangan tersebut.

Perubahan peran dan adegan bisa terjadi. Perubahan ini tidak sepenuhnya dikehendaki atau dipilih oleh subjek perubahan sosial yang bersangkutan.

Jasa dan prestasi pers Indonesia layak dihargai, tanpa perlu diromantisasi dan dibesarkan dalam penulisan sejarah. Jasa dan prestasi itu terbentuk bukan karena suatu esensi atau jati diri tertentu yang bersifat otonom, universal, atau alamiah.

Juga bukan sekadar karena subjek jurnalisnya punya watak, semangat, tekad, kepribadian atau kecerdasan yang istimewa. Banyak faktor pembentuknya. Sebagian bersifat struktural, sebagian historis, sebagian subjektif, dan seterusnya.

Dalam pertumbuhan dan perjuangannya sewaktu muda, pers Indonesia telah mendapatkan banyak dukungan dari institusi lain: hukum, politik, bahasa, teknologi, dan kini industri.

Sepantasnya kini, di saat sudah menjadi raksasa industrial mapan, tapi tidak lagi bisa gesit sebagai aktivis, pers Indonesia memberikan dukungan pada para aktivis muda pers maupun nonpers. Apalagi bila tujuan akhir perjuangan kaum muda itu ikut dinikmati pers.

Penulis adalah staf pengajar UK Satya Wacana, Salatiga.